



Dinamika Baha'i di Riau: Pergulatan Minoritas dalam Identitas Melayu

Muh. Said HM¹, Syafi'ah², Imam Hanafi³

¹said.syafiah@uin-suska.ac.id, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

²syafiah@uin-suska.ac.id, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

³imam.hanafi@uin-suska.ac.id, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

*Corresponding Author: imam.hanafi@uin-suska.ac.id

Abstrak

Studi ini meneliti pergulatan identitas komunitas Baha'i di Pekanbaru, Riau, sebuah wilayah di mana identitas Melayu secara budaya terikat dengan Islam. Meskipun secara hukum diizinkan, Baha'i secara simbolis terpinggirkan karena narasi hegemonik bahwa "menjadi orang Melayu berarti menjadi Muslim." Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Penelitian ini menggunakan teori identitas sosial, kekuatan simbolik (Bourdieu), dan transkrip tersembunyi (Scott) untuk memahami bagaimana komunitas ini menghadapi pengucilan. Temuan menunjukkan bahwa umat Baha'i sering kali menyembunyikan identitas agama mereka dalam kehidupan publik dan administratif, memilih untuk beribadah secara privat dan tidak terlalu menonjol. Namun, mereka juga membentuk aliansi sosial dengan bergabung dalam jaringan lintas agama seperti ISAIS, AIPI Riau, dan SABDA. Strategi-strategi ini mencerminkan suatu bentuk ketahanan budaya dan negosiasi. Penelitian ini menyoroti bagaimana kelompok minoritas agama mempertahankan agensi spiritual sambil beradaptasi dengan struktur etno-religius yang dominan dalam masyarakat multikultural.

Kata kunci: Baha'i; Identitas; Kekuatan Simbolik; Melayu-Islam; Minoritas Agama; Riau.

Abstract

This study examines the identity struggles of the Baha'i community in Pekanbaru, Riau, a region where Malay identity is culturally tied to Islam. Although legally permitted, the Baha'i are symbolically marginalized due to the hegemonic narrative that "to be Malay is to be Muslim." Using a qualitative descriptive-interpretive approach, data were collected through interviews, observation, and Focus Group Discussion (FGD). The study applies social identity theory, symbolic power (Bourdieu), and hidden transcripts (Scott) to understand how the community navigates exclusion. Findings show that Baha'is often conceal their religious identity in public and administrative life, opting for private worship and low-profile engagement. However, they also form social alliances by joining interfaith networks such as ISAIS, AIPI Riau, and SABDA. These strategies reflect a form of cultural resilience and negotiation. The research highlights how religious minorities maintain spiritual agency while adapting to dominant ethno-religious structures in a multicultural society.

Keywords: Baha'i; identity; Malay-Islam; Religious Minority; Riau; Symbolic Power.

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultural, sebuah negeri yang menyimpan kekayaan keberagaman layaknya zamrud khatulistiwa (Zikri, 2020). Namun, di balik kemajemukan itu, tersimpan kompleksitas dalam relasi antaragama dan antar identitas etnis yang tak jarang menimbulkan ketegangan (Liliweri, 2005). Dengan ribuan suku, bahasa, dan sistem kepercayaan yang hidup berdampingan, Indonesia

menjadi arena yang dinamis bagi interaksi sosial, tetapi sekaligus rentan terhadap konflik yang berakar pada perbedaan identitas. Salah satu isu paling krusial dalam lanskap ini adalah persoalan kebebasan beragama (Firdaus et al., 2023; Hanafi, 2018; Yunus, 2014). Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya, dalam praktiknya negara hanya mengakui enam agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu (Arafat Noor Abdillah & Syafira Anisatul Izah, 2022). Akibatnya, komunitas keagamaan di luar enam agama tersebut, seperti Baha'i, kerap berada dalam posisi marginal—tidak hanya dalam hal pengakuan administratif, tetapi juga dalam penerimaan sosial.

Kondisi marginalisasi ini tidak hanya bersumber dari kebijakan negara, tetapi juga dari tekanan sosial masyarakat mayoritas (Gazi, 2013). Dalam praktiknya, komunitas agama minoritas seperti Baha'i tidak jarang mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-hak sipil dasar, seperti pencatatan pernikahan, pengakuan kolom agama di KTP, dan Pendidikan Agama sesuai keyakinannya (Cintya & Setyowati, 2020; Merdeka.com, 2016; Sinaga & Sihombing, 2022). Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika kelompok minoritas tersebut berada dalam ruang budaya yang sangat identik dengan satu agama dominan. Di Provinsi Riau, misalnya, identitas etnis Melayu telah sejak lama dikonstruksi dalam bingkai keislaman. Ungkapan populer "*Melayu adalah Islam, dan Islam adalah Melayu*" menjadi simbol kuat dari keterkaitan antara etnis dan agama dalam struktur sosial masyarakat Riau (A. Dahlan, 2015; Mohammad, 2009; Rab, 1990).

Dalam konteks inilah, keberadaan komunitas Baha'i di Pekanbaru, Riau menjadi sangat menarik untuk dikaji. Sebagai kelompok agama yang tidak diakui secara formal dalam sistem agama negara, umat Baha'i dihadapkan pada tantangan ganda: keterbatasan legal-formal dan tekanan kultural dari masyarakat Melayu-Islam yang dominan. Meski demikian, mereka tetap berusaha mempertahankan eksistensinya melalui berbagai strategi sosial dan adaptasi simbolik dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana komunitas ini bertahan dalam situasi sosial yang cenderung eksklusif terhadap identitas keagamaan mereka? Dan bagaimana masyarakat Melayu merespon keberadaan mereka dalam konteks identitas budaya yang melekat pada agama?

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyinggung keberadaan komunitas Baha'i di beberapa daerah di Indonesia. Nuh (2014) menjelaskan komunitas Baha'i di Pati (Jateng), Banyuwangi/Malang (Jatim), Palopo (Sulsel) dan Bandung (Jabar); Rosyid (2019) mengulas konflik antara umat Baha'i dan Muslim di Pati; Veronika et al., (2021) meneliti ketahanan komunitas Baha'i di Mentawai; sementara Rizaldy & Suyanto (2020) menyoroti strategi adaptif Baha'i di Surabaya. Namun, kajian yang secara eksplisit menghubungkan keberadaan komunitas Baha'i dengan dinamika etnis Melayu sebagai kelompok dominan yang identitasnya dilekatkan dengan agama Islam masih belum dilakukan.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunitas agama Baha'i di Pekanbaru, Riau, serta menelaah respon masyarakat Melayu terhadap eksistensi komunitas tersebut. Dengan menyoroti relasi antara identitas

keagamaan dan etnisitas, kajian ini diharapkan dapat memperkaya wacana tentang pluralisme, toleransi, dan keberagaman dalam masyarakat yang secara historis dan kultural membingkai identitasnya secara eksklusif. Artikel ini juga hendak mengisi kekosongan literatur dalam kajian minoritas agama di wilayah dengan dominasi identitas etnis-keagamaan yang kuat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-interpretatif (Ridwan, 2005). Pendekatan ini dipilih karena isu yang diangkat menyangkut persoalan identitas keagamaan dan relasi sosial yang kompleks, yang hanya bisa dipahami melalui penelusuran makna, pengalaman, serta respons dari para pelaku sosial secara mendalam. Lokasi penelitian dipusatkan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, khususnya pada komunitas Baha'i yang menetap di kawasan Delima. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat berkumpulnya komunitas Baha'i yang cukup aktif, meskipun jumlahnya sangat terbatas.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai teknik, antara lain wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama anggota komunitas Baha'i, tokoh adat Melayu, serta tokoh agama Islam yang memiliki pengaruh dalam komunitas lokal. Peneliti juga melakukan observasi terhadap beberapa aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh komunitas Baha'i, termasuk pelaksanaan pendidikan non-formal Institut Ruhi dan peringatan hari besar seperti *Naw-Rúz*. Di samping itu, dokumen-dokumen internal komunitas, arsip pemberitaan lokal, serta peraturan-peraturan negara terkait pengakuan agama juga menjadi bahan penting dalam menunjang analisis.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yakni mereka yang dianggap memiliki pengetahuan langsung, pengalaman personal, atau peran strategis dalam relasi antara komunitas Baha'i dan masyarakat Melayu (Bungin, 2012). Untuk memperkuat validitas data, dilakukan triangulasi, baik dari sisi sumber maupun metode. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak hanya bersumber dari satu sisi, tetapi mencerminkan pandangan yang lebih utuh dan beragam (Emzir, 2014).

Seluruh data dianalisis dengan pendekatan *content analysis* (Arifin, 2012). Peneliti terlebih dahulu mereduksi data, kemudian mengelompokkannya ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus kajian, seperti strategi adaptasi komunitas Baha'i, konstruksi identitas Melayu-Islam, serta bentuk-bentuk penerimaan atau penolakan yang muncul. Setelah itu, dilakukan interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam atas dinamika sosial yang terjadi.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Keberadaan Komunitas Baha'i di Pekanbaru: *Minoritas dalam Hening*

Agama Baha'i pertama kali masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-19, diperkenalkan oleh Jamal Effendi dan Mustafa Rumi pada tahun 1884–1885. Fase awal ini menandai penyebaran ajaran Baha'i ke beberapa wilayah seperti Batavia,

Celebes (Sulawesi), Bali, dan Surabaya. Selanjutnya, fase-fase berikutnya ditandai oleh kedatangan imigran dari Persia (kini Iran) yang memperkenalkan ajaran Baha'i melalui jalur pendidikan dan pelayanan sosial, seperti dokter dan saudagar (Rizaldy & Suyanto, 2020). Pada dekade-dekade selanjutnya, komunitas ini berkembang di berbagai wilayah, termasuk Banyuwangi, Makassar, dan Pontianak. Meskipun tidak pernah menjadi komunitas besar secara jumlah, keberadaan Baha'i tersebar di lebih dari 130 kota di Indonesia dan terus bertahan melalui jejaring spiritual dan pendidikan yang terorganisir secara global melalui Majelis Rohani Nasional Baha'i (Majelis Rohani Nasional, 2013).

Di antara wilayah-wilayah tersebut, Pekanbaru menjadi salah satu ruang ekspresi Baha'i yang menarik untuk dikaji, mengingat kuatnya identitas budaya Melayu-Islam yang mendominasi kehidupan sosial masyarakat. Komunitas Baha'i di Pekanbaru merupakan kelompok kecil dan tertutup. Hingga saat ini, jumlah mereka tercatat sekitar sembilan kepala keluarga. Komunitas ini tersebar di beberapa titik wilayah kota, namun memiliki satu titik sentral aktivitas di kediaman Suparni, seorang pensiunan dari perusahaan migas yang telah lama menjadi tokoh kunci dalam mempertahankan keberlangsungan komunitas. Rumah Suparni bukan hanya menjadi ruang pertemuan, tetapi juga pusat aktivitas spiritual dan edukatif komunitas.

Di tempat tersebut, berbagai kegiatan keagamaan dilakukan secara rutin, mulai dari peringatan hari-hari besar keagamaan seperti *Naw-Rúz* (Tahun Baru Baha'i) dan *Ridván* (hari deklarasi kenabian Baha'u'lláh), hingga pengajaran nilai-nilai universal melalui program pendidikan nonformal bernama Institut Ruhi. Program ini menjadi sarana utama pembinaan spiritual dan sosial bagi anggota komunitas, bahkan terbuka bagi kalangan lintas agama yang tertarik pada nilai-nilai moral universal seperti keadilan, kejujuran, dan pelayanan kepada sesama.

Gambar 1. Salah satu Kegiatan *Ridvan* yang dihadiri oleh Lintas Iman



Sumber; Dokumen Pribadi, 2025

Namun, kehidupan spiritual yang tampak damai ini sesungguhnya dibingkai oleh situasi sosial yang kompleks. Berdasarkan wawancara dengan Suparni (21

Desember 2024), komunitas Baha'i di Pekanbaru memang tidak mengalami intimidasi fisik atau pengusiran dari masyarakat sekitar. Mereka merasa relatif aman secara sosial. Akan tetapi, tantangan muncul pada aspek administratif dan legal. Banyak dari mereka kesulitan mencantumkan identitas keagamaannya dalam kolom agama di KTP, atau menghadapi hambatan dalam mengakses layanan pencatatan sipil. Dalam banyak kasus, mereka bahkan “menyembunyikan” identitas keagamaannya dan memilih mencantumkan agama mayoritas agar terhindar dari stigma dan diskriminasi.

“Kami memang tidak dilarang ibadah, tapi kadang kami harus diam. Kami tidak bisa terlalu terbuka, apalagi soal anak-anak di sekolah. Mereka kadang terpaksa belajar agama Islam,” (Wawancara, *Nina*, informan perempuan yang meminta namanya disamarkan).

Fenomena ini menggambarkan apa yang oleh Erving Goffman (1963) disebut sebagai “manajemen kesan” (*impression management*) dalam masyarakat yang menstigma identitas tertentu. Komunitas Baha'i di Pekanbaru secara strategis mengelola tampilan identitas mereka di ruang publik untuk meminimalkan risiko sosial. Dalam hal ini, mereka memainkan “peran sosial” yang disesuaikan dengan ekspektasi dominan agar tetap diterima dalam komunitas yang secara kultural mengidentikkan Melayu dengan Islam (Dunne et al., 2021; Schneider & Goffman, 1964).

Lebih jauh, strategi diam-diam yang dijalankan komunitas Baha'i di Pekanbaru dapat dipahami melalui kerangka teori *hidden transcript* dari Scott (2022), yakni ekspresi identitas, resistensi, atau perlawanan yang tidak diartikulasikan secara terbuka dalam ruang publik yang diawasi oleh kekuasaan dominan, melainkan diekspresikan dalam ruang-ruang tersembunyi seperti rumah, komunitas internal, dan forum tertutup (lihat juga (Mullaney, 1993)). *Hidden transcript* bukan sekadar bentuk kepasrahan, tetapi merupakan arena di mana narasi alternatif, ekspresi keyakinan, dan praktik keberagamaan tetap dipertahankan meski dalam keterbatasan.

Dalam konteks komunitas Baha'i, ruang-ruang privat ini menjadi medan utama untuk melangsungkan ritual keagamaan, memperkuat jaringan sosial internal, dan mentransmisikan nilai-nilai serta ajaran spiritual kepada generasi muda. Meskipun tidak mendapatkan pengakuan formal dari negara, serta menghadapi tekanan simbolik dari masyarakat sekitar, komunitas ini tetap menjaga kesinambungan keyakinan mereka melalui praktik yang bersifat *low profile* namun konsisten (Rohmatullah & Khanayya, 2023). Di sinilah *hidden transcript* menjadi bentuk “politik sunyi” yang tidak frontal, tetapi memiliki kekuatan laten untuk mempertahankan identitas dan solidaritas kelompok dalam situasi dominasi kultural yang hegemonik.

Dengan kata lain, komunitas Baha'i di Pekanbaru menghadirkan contoh konkret dari bagaimana minoritas keagamaan membentuk strategi adaptif di bawah tekanan hegemoni identitas dominan, dalam hal ini Melayu-Islam. Mereka tidak memilih jalur konfrontasi, melainkan beradaptasi dengan cara “tidak terlihat namun tetap ada,” sebuah bentuk resiliensi sosial kultural yang halus namun kuat (Tugade & Fredrickson, 2004).

3.2. Pergulatan Identitas: Antara Eksistensi Baha'i dan Kultur Melayu-Islam

Kehadiran komunitas Baha'i di Pekanbaru tidak sekadar persoalan eksistensi agama minoritas, tetapi menyentuh aspek yang lebih dalam, yakni *pergulatan identitas* dalam ruang sosial yang dikonstruksi secara eksklusif sebagai “Melayu-Islam”. Ungkapan populer “*Melayu itu Islam, dan Islam itu Melayu*” bukan hanya pepatah adat, melainkan telah menjelma menjadi perangkat ideologis yang membingkai cara masyarakat berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap kelompok lain. Dalam konteks ini, identitas Melayu tidak bersifat etnis semata, melainkan telah mengalami *sakralisasi* melalui agama Islam sebagai inti dari ekspresi kultural dan politiknya.

Konstruksi ini berakar kuat dalam sejarah kebudayaan dan kekuasaan lokal. Menurut Timothy P. Barnard (2001), integrasi antara unsur religius dan etnis dalam Kerajaan Siak yang berlangsung sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-19 memainkan peran penting dalam pembentukan identitas Melayu yang khas di wilayah Riau. Dalam periodisasi tersebut, Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga secara sistematis dijadikan sebagai pilar utama dalam konstruksi politik dan kebudayaan kerajaan. Proses Islamisasi tidak berlangsung sebagai proses konversi individual semata, melainkan sebagai bagian dari strategi legitimasi kekuasaan dan pembentukan struktur sosial yang lebih luas.

Namun demikian, pandangan ini bertentangan dengan catatan Nathan Porath (Porath, 2013, 2015). Menurutnya, dalam sejarah panjang Kerajaan Siak Sri Indrapura, identitas Melayu pada masa lalu tidak selalu dibingkai secara eksklusif dalam terminologi keislaman. Hal ini ditunjukkan dengan eksistensi yang dimiliki oleh suku Sakai dan suku Asli Anak Rawa, yang tidak hanya memiliki identitas Islam, justru mengalami *Kosmopolitanisme Identitas Melayu* yang inklusif dalam struktur sosial-politik Kerajaan Siak. Alih-alih menyingkirkan kelompok-kelompok non-Islam atau *indigenous* seperti Sakai dan Asli Anak Rawa karena perbedaan agama atau adat, Kerajaan Siak justru mengakomodasi mereka sebagai bagian dari kekuatan sosial dan politik Kawasan (Porath, 2018). Identitas Melayu pada masa itu lebih bersifat terbuka dan pluralistik, ditandai dengan kolaborasi antareleman sosial yang beragam—termasuk masyarakat adat, kelompok migran, dan elite Islam.

Dalam pandangan ini, *kemelayuan* lebih merupakan konstruksi kultural yang lentur dan cair, bukan identitas homogen berbasis tunggal agama. Justru melalui keberagaman internal itulah Kerajaan Siak berhasil membangun fondasi kekuasaan yang kuat dan dihormati hingga akhirnya bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1945 (Barnard, 2001b, 2003; Porath, 2018). Namun demikian, narasi sejarah ini tampaknya mengalami penyempitan dalam wacana kontemporer di Riau, di mana kemelayuan mulai dibakukan secara normatif dengan identitas Islam sebagai satu-satunya rujukan otentik. Islam kemudian tidak sekadar menjadi agama yang dianut oleh raja dan rakyat, tetapi juga menjadi fondasi dari struktur kenegaraan, adat, dan sistem nilai Masyarakat (Mahdini, 2003). Identitas Melayu pun dikonstruksi melalui lensa keislaman yang begitu kuat, sehingga agama menjadi batas simbolik yang menentukan siapa yang termasuk dan siapa yang

berada di luar komunitas. Dengan kata lain, sejak era Kesultanan Siak, telah terbentuk fondasi ideologis bahwa menjadi Melayu berarti menjadi Muslim.

Warisan historis inilah yang kemudian terus direproduksi dalam kesadaran kolektif masyarakat Melayu Riau hingga masa kini. Narasi dominan yang mengaitkan kemelayuan dengan Islam tidak sekadar dianut sebagai sistem keyakinan, tetapi juga menjadi pilar legitimasi adat, tatanan moral, dan bahkan struktur pemerintahan tradisional (Hanif & Dwi, 2021). Dalam ungkapan adat Melayu, sering dijumpai rumusan “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*,” yang menunjukkan bahwa adat tidak hanya berjalan beriringan dengan Islam, melainkan tunduk kepada nilai-nilai syariat (Purnama, 2021). Maka, menjadi “Melayu” secara penuh berarti juga menjadi Muslim. Dalam pandangan masyarakat setempat, “kemelayuan” seseorang sering kali diukur dari kepatuhannya pada norma-norma keislaman—baik dalam ibadah, cara berpakaian, hingga relasi sosial (Hasbullah, 2007). Salah satu tokoh adat menyatakan secara eksplisit dalam wawancara:

“Kami tidak benci mereka [Baha’i], tapi Melayu ini Islam, dan itu sudah sejak dulu. Kalau ada orang yang ngakunya Melayu tapi agamanya bukan Islam, itu sudah bukan Melayu menurut kami.” (*Wawancara dengan tokoh adat Melayu, Pekanbaru, 10 Desember 2024*)

Pernyataan ini mencerminkan logika eksklusi simbolik yang terjadi di lapangan—di mana agama tidak hanya menjadi ranah spiritual, tetapi juga menjadi *kriteria keanggotaan kultural*. Komunitas seperti Baha’i, meskipun mungkin memiliki akar etnis yang sama atau telah hidup lama di wilayah Melayu, tetap dianggap sebagai yang “lain” atau bahkan “menyimpang” karena keyakinan keagamaannya tidak sesuai dengan Islam. Hal ini sesuai dengan konsep *boundary-making* dalam kajian identitas Ward & Barth, (1967), yang menekankan bahwa kelompok etnis (dan dalam konteks ini, etno-religius) didefinisikan bukan hanya oleh kesamaan internal, tetapi juga oleh garis pemisah terhadap yang dianggap bukan bagian dari “kami” (Barth, 1969).

Komunitas Baha’i dalam konteks ini, berada dalam posisi yang serba liminal. Mereka tidak diterima sepenuhnya sebagai bagian dari identitas lokal, tetapi juga tidak berposisi secara terbuka. Strategi yang mereka pilih adalah membatasi ekspresi keagamaan hanya dalam ruang privat dan menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan sorotan publik. Suparni, tokoh komunitas Baha’i di Pekanbaru, menjelaskan:

“Kami tahu kami berbeda, dan kami tidak ingin mengganggu. Karena itu kami ibadah di rumah saja, dan kegiatan pun kami batasi. Kadang, untuk urusan administrasi, kami isi agama Islam, supaya tidak repot.” (*Wawancara dengan informan, nama disamarkan, 21 Desember 2024*).

Strategi ini menunjukkan praktik yang oleh Scott, (2022) disebut sebagai *hidden transcript*, yakni bentuk ekspresi identitas dan perlawanan yang disampaikan secara tersembunyi, tidak konfrontatif, tetapi bertahan di ruang domestik. Sementara di ruang publik, mereka melakukan apa yang Goffman (1963) sebut sebagai *impression management*—menyesuaikan “wajah sosial” agar sesuai dengan norma

mayoritas dan menghindari sanksi sosial. Pergulatan identitas ini menjadi nyata tidak hanya dalam wacana, tetapi juga dalam praktik hidup sehari-hari. Seorang perempuan anggota komunitas Baha'i menceritakan:

“Anak saya, bahkan saya dulu, di sekolah ikut pelajaran agama Islam, padahal saya Baha'i. Kalau bilang yang sebenarnya, takut nanti dikucilkan. Jadi kami diam saja.” (*Wawancara dengan informan, nama disamarkan*, 21 Desember 2024)

Situasi ini menunjukkan bahwa komunitas Baha'i tidak hanya berjuang untuk menjalankan keyakinan, tetapi juga untuk tetap “diakui” secara sosial dalam masyarakat yang memadukan etnisitas dan agama ke dalam satu paket identitas kolektif. Mereka hidup dalam realitas sosial yang menuntut penyesuaian terus-menerus, sebuah bentuk pergulatan simbolik untuk bertahan di tengah hegemoni narasi “Melayu-Islam”.

Pergulatan ini tidak hanya terjadi secara eksternal, tetapi juga internal. Banyak anggota komunitas Baha'i merupakan keturunan dari keluarga Muslim, bahkan ada yang sebelumnya memeluk Islam. Maka, pergulatan mereka dengan identitas tidak hanya terhadap dunia luar, tetapi juga dalam dirinya sendiri—antara memeluk keyakinan spiritual yang baru dengan tetap menjaga harmoni sosial di tengah lingkungan yang menganggap keyakinan itu sebagai ancaman.

Dalam konteks ini, komunitas Baha'i di Pekanbaru menjadi contoh konkret bagaimana minoritas religius harus bergulat dengan identitas kolektif yang hegemonik, bukan hanya untuk bertahan hidup secara administratif atau spiritual, tetapi juga untuk sekadar *diakui* sebagai bagian dari kehidupan sosial. Di sinilah letak ketegangan antara kebebasan individu dalam beragama dan determinasi budaya lokal yang memadukan etnisitas dan agama menjadi satu paket identitas.

Sebagai bentuk adaptasi dan ikhtiar membangun ruang sosial yang lebih inklusif, komunitas Baha'i tidak memilih jalur isolasi total. Sebaliknya, mereka aktif bergabung dalam forum lintas iman yang terbentuk di Pekanbaru. Salah satu ruang strategis tersebut adalah Komunitas Lintas Iman Pekanbaru, sebuah jaringan kolaboratif yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil dan akademik, seperti ISAIS (*Institute for Southeast Asian Islamic Studies*), AIPI Riau (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) Cabang Riau, dan Suara Bersama untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SABDA) Riau. Dalam forum ini, komunitas Baha'i mendapatkan ruang untuk menyuarakan keberadaan mereka, berbagi nilai-nilai universal tentang perdamaian, dan membangun solidaritas dengan kelompok-kelompok lain yang mengalami situasi marginal serupa.

Gambar 2. Suasana Keterlibatan Umat Baha'i dalam Pembentukan SABDA Riau

Sumber: *Dokumen Pribadi*, 2024

Keikutsertaan dalam komunitas lintas iman ini juga merupakan bagian dari strategi sosial yang cerdas—yakni menciptakan ruang bersama yang aman secara sosial dan simbolik, di mana identitas tidak lagi menjadi batas pemisah, melainkan jembatan untuk dialog dan rekognisi. Strategi ini memperlihatkan bahwa meskipun secara struktural mereka berada dalam posisi subordinat, komunitas Baha'i tetap aktif melakukan apa yang Bailey & Scott, (1987) sebut sebagai *"infrapolitik"*—yakni praktik-praktik sosial kecil yang tampak sederhana tetapi bermakna politis dalam memperluas ruang eksistensi di tengah tekanan hegemoni.

3.3. Respon Masyarakat Melayu: Di Antara Toleransi dan Kecurigaan

Secara umum, para tokoh Melayu di Riau menunjukkan sikap yang ambivalen terhadap keberadaan agama Bahá'í. Di satu sisi, mereka mengakui bahwa Bahá'í sebagai agama otonom memiliki hak untuk eksis dan menjalankan keyakinannya secara damai. Namun, di sisi lain, pandangan ini kerap dibingkai dalam konteks identitas keislaman yang sangat kuat dalam budaya Melayu. Islam tidak hanya dipahami sebagai agama, tetapi juga sebagai elemen kultural dan historis yang melekat dalam konsep "Melayu". Ungkapan seperti "Melayu itu Islam" tidak hanya merefleksikan realitas demografis, tetapi juga menjadi narasi hegemonik yang mengatur siapa yang dianggap bagian dari komunitas, dan siapa yang diletakkan di luar batas identitas kolektif (Fox, 2013).

Dalam FGD yang dilaksanakan di Pekanbaru (Desember 2024), seorang tokoh adat menyatakan, *"Kalau Melayu, ya Islam. Bukan berarti kita menolak yang lain, tapi memang adat kami sudah dari dulu begitu, Islam itu bagian dari jiwa Melayu."* Pandangan semacam ini menempatkan Islam sebagai landasan utama dalam struktur sosial dan kultural masyarakat Melayu, sehingga munculnya agama lain seperti Bahá'í sering kali dipersepsi sebagai potensi ancaman terhadap kohesi sosial dan stabilitas identitas kultural.

Pandangan serupa juga muncul dalam wawancara dengan salah satu ulama di Pekanbaru. Ia menyampaikan bahwa meskipun negara menjamin kebebasan beragama, ajaran Bahá'í dianggap menyimpang dari prinsip dasar Islam karena meyakini Baha'u'llah sebagai nabi setelah Muhammad SAW. *“Kami tidak bisa menerima itu. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, dan itu bagian dari akidah yang tidak bisa ditawar-tawar,”* tegasnya. Dalam konteks ini, keberadaan Bahá'í bukan hanya dilihat sebagai alternatif keyakinan, tetapi sebagai penyimpangan teologis yang berpotensi membingungkan umat. Oleh karena itu, sejumlah tokoh agama di Riau secara aktif memberikan peringatan kepada masyarakat untuk mewaspadai penyebaran ajaran Bahá'í dan bahkan mendorong adanya langkah preventif agar ajaran tersebut tidak berkembang, khususnya di kalangan umat Muslim (Nurhanisah Senin et al., 2021).

Cara pandang ini berimplikasi pada adanya ketegangan terselubung antara prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi dan keinginan sebagian masyarakat untuk mempertahankan kemurnian akidah Islam (Senin & Hambali, 2018). Beberapa narasumber dalam FGD menolak penggunaan istilah “dakwah” dalam konteks Baha'i, karena menurut mereka itu bisa diartikan sebagai upaya konversi yang menyalahi norma lokal. *“Kami tidak melarang mereka hidup di sini, tapi jangan sampai ada ajakan-ajakan ke warga untuk ikut Baha'í. Itu bisa mengganggu ketenteraman masyarakat,”* ujar salah satu tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Pekanbaru.

Sementara itu, dari sisi pandangan adat, sebagian besar tokoh adat Melayu masih sangat erat memadukan adat dengan Islam. Salah seorang datuk Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, menyatakan bahwa ajaran Baha'i sulit diterima karena dianggap tidak sejalan dengan tatanan adat yang telah dibangun sejak lama. *“Adat kami berasaskan Islam, kalau ada yang lain masuk, itu akan mengganggu keseimbangan yang sudah ada,”* ujarinya. Kekhawatiran mereka bukan semata pada aspek teologis, tetapi juga pada potensi tergerusnya nilai-nilai tradisional dan harmoni sosial. Dalam pandangan ini, penerimaan terhadap ajaran Bahá'í dipersepsi sebagai ancaman terhadap kontinuitas budaya Melayu itu sendiri (M. Faisal, 2019).

Dalam konteks ini, ajaran Baha'i sering kali diposisikan sebagai bentuk penyimpangan dari akidah Islam. Beberapa ulama dan tokoh agama lokal memandang ajaran Baha'í sebagai tantangan terhadap kemurnian teologi Islam, khususnya karena prinsip dasar Baha'i yang mengakui kenabian setelah Nabi Muhammad dianggap bertentangan dengan doktrin penutupan wahyu dalam Islam. Kekhawatiran ini semakin menguat di tengah arus informasi global dan media sosial, yang memudahkan penyebaran gagasan lintas batas agama. Bagi sebagian kalangan Ulama dan Lembaga Adat Melayu Riau (dalam FGD), memandang bahwa kehadiran agama baru seperti Baha'i dapat memicu kebingungan teologis di kalangan generasi muda dan dianggap sebagai bentuk dekadensi spiritual yang harus dicegah (Puji Hartatik & Listyaningsih, 2019).

Lebih dari sekadar persoalan akidah, resistensi terhadap Bahá'í juga lahir dari kesadaran kultural masyarakat Melayu yang sangat menjunjung nilai adat dan tradisi. Dalam budaya Melayu, agama dan adat saling menopang; ritual keagamaan

dilekatkan dengan kehormatan keluarga, struktur sosial, dan tatanan adat (Junaidi, 2020; Muhammad Hafiz & Tafsiruddin, 2022; Tarwiyani, 2021). Oleh karena itu, ajaran dan ritual Bahá'í yang berbeda dari Islam kerap kali dipersepsikan sebagai sesuatu yang asing atau bahkan mengganggu harmoni kultural yang telah diwariskan secara turun-temurun (H. Faisal et al., 2022). Dalam hal ini, eksistensi Bahá'í bukan hanya dipandang sebagai “yang berbeda”, tetapi juga sebagai tantangan simbolik terhadap konstruksi identitas Melayu itu sendiri.

Namun demikian, tidak seluruh masyarakat Melayu di Riau bersikap eksklusif. Sejarah panjang hubungan antaragama dan antaretnis di wilayah ini juga memperlihatkan tradisi toleransi yang cukup kuat. Dalam sejumlah kasus, warga Melayu menunjukkan keterbukaan terhadap keberadaan komunitas Bahá'í, terutama ketika terdapat beberapa komunitas Muslim dan Kelompok Lintas Iman, yang berupaya untuk menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai keragaman (S. Dahlan, 2004; Jubba et al., 2021). Beberapa tokoh ini, berupaya menciptakan ruang diskusi terbuka antara komunitas Bahá'í dan komunitas Muslim serta Lintas Iman di Riau, meskipun ini bisa menjadi tantangan karena sensitivitas isu agama di wilayah tersebut. Misalnya beberapa aktifis dari *Institute for Southeast Asian Islamic Studies* (ISAIS) UIN Suska Riau Bersama dengan *Asosiasi Ilmu Politik Indonesia* (AIPI) Cabang Riau, berupaya memberikan pendampingan dalam “menghidup” kan aktivitas-aktivitas keagamaan Baha'i di Riau (M. , Ansor et al., 2024).

Mereka ini, secara intens mengikuti dan memberikan apresiasi atas berbagai aktivitas keagamaan yang ada dalam tradisi Baha'i, seperti peringatan Naw-Rúz (Tahun Baru Bahá'í), Ridván (Festival Ridván), Perayaan 19 Hari (Nineteen Day Feast), dan Hari Kelahiran Bahá'u'lláh. ISAIS sendiri merupakan Lembaga yang anggotanya terdiri dari para akademisi, aktivis HAM, atau organisasi masyarakat yang berfokus pada kerukunan dan pluralisme (M. Ansor et al., 2024). Mereka berpendapat bahwa konflik agama dapat dicegah melalui komunikasi yang baik, pemahaman, dan pendidikan mengenai toleransi. Meskipun suara mereka mungkin tidak dominan, mereka tetap berupaya untuk menjaga dialog terbuka dan inklusif.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap dinamika sosial yang kompleks antara komunitas Baha'i dan masyarakat Melayu di Pekanbaru, Riau. Di wilayah yang identitas etnisnya dilekatkan erat dengan agama Islam, kehadiran komunitas Baha'i menghadirkan tantangan identitas yang serius. Konstruksi sosial yang menempatkan Islam sebagai inti dari kemelayuan—yang terbentuk sejak era Kesultanan Siak dan terus direproduksi melalui adat, pendidikan, dan wacana publik—menyulitkan kelompok agama non-Islam untuk diakui sebagai bagian dari komunitas lokal secara simbolik maupun kultural.

Komunitas Baha'i di Pekanbaru merespons realitas ini dengan strategi yang cermat dan berlapis. Mereka memilih untuk tidak menampilkan identitasnya secara terbuka dalam ruang publik, tetapi tetap mempertahankan praktik keagamaan secara privat melalui pusat komunitas dan pendidikan nonformal seperti Institut Ruhi. Strategi “keheningan identitas” ini tidak berarti kepasrahan, melainkan bentuk

resiliensi kultural yang disesuaikan dengan konteks sosial. Mereka juga aktif membangun ruang kolaboratif dengan bergabung dalam komunitas lintas iman bersama organisasi seperti ISAIS, AIPI Riau, dan SABDA—sebuah bentuk *infrapolitik* untuk menciptakan ruang eksistensi yang lebih aman dan setara.

Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa pergulatan komunitas Baha'i di Pekanbaru mencerminkan dinamika antara identitas keagamaan dan batas-batas kultural dalam masyarakat mayoritas. Ini bukan hanya persoalan toleransi, tetapi juga menyangkut relasi kuasa, simbolisme identitas, dan strategi adaptasi dalam menghadapi struktur sosial yang eksklusif. Penelitian ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana minoritas keagamaan membangun ruang hidup di tengah dominasi simbolik budaya mayoritas, sekaligus membuka ruang untuk diskusi kebijakan dan praksis sosial yang lebih adil dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Ansor, M. , Masyhur, L. S., Hermanto, B., & Habibi, Mhmd. (2024). Penguatan Kemitraan Lintas Iman Muslim dan Bahai melalui Bincang Diskursus Keragaman . *Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 46-56.
- Arafat Noor Abdillah, & Syafira Anisatul Izah. (2022). DINAMIKA HUBUNGAN ANTARA AGAMA LOKAL, AGAMA RESMI, DAN NEGARA. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2966>
- Arifin, Z. (2012). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Remaja Rosdakarya.
- Bailey, F. G., & Scott, J. C. (1987). Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. *Pacific Affairs*, 60(2). <https://doi.org/10.2307/2758183>
- Barnard, T. P. (2001a). Rules for rulers: Obscure texts, authority, and policing in two malay states. *Journal of Southeast Asian Studies*, 32(2). <https://doi.org/10.1017/s0022463401000108>
- Barnard, T. P. (2001b). Texts, Raja Ismail and violence: Siak and the transformation of malay identity in the eighteenth century. *Journal of Southeast Asian Studies*, 32(3). <https://doi.org/10.1017/s0022463401000170>
- Barnard, T. P. (2003). Multiple centers of authority: society and environment in Siak and eastern Sumatra, 1674-1827. In *Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde* (Vol. 210).
- Barth, F. (1969). *Kelompok-Kelompok Etnik dan Batasannya*. Universitas Indonesia Press.
- Bungin, B. (2012). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Rajawali. Pers.
- Cintya, D. F., & Setyowati, Rr. N. (2020). Implementasi Surat Kemenag No. 675 Tahun 2014 Perihal Penjelasan Mengenai Pengikut Agama Baha'i terhadap Pemenuhan Hak Sipil di Bidang Administrasi Kependudukan di Surabaya. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(2).
- Dahlan, A. (2015). *Sejarah Melayu*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Dahlan, S. (2004). Budaya Melayu Riau Pada Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Budaya*, 1(1).

- Dunne, N. J., Brennan, N. M., & Kirwan, C. E. (2021). Impression management and Big Four auditors: Scrutiny at a public inquiry. *Accounting, Organizations and Society*, 88. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2020.101170>
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Rajawali Press,.
- Faisal, H., Uin, S., Thaha, S., Jambi, I., Sari, M., Farah, N., Binti, A., & Isamuddin, N. (2022). RELIGIOUS MODERATION IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS: Concept and Implementation. In *Journal of Religious Moderation* (Vol. 1, Issue 1).
- Faisal, M. (2019). ETIKA RELIGIUS MASYARAKAT MELAYU: KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN RAJA ALI HAJI. *PERADA*, 2(1). <https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.30>
- Firdaus, R., Nurbaiti, N., Halim, A., & Mubarak, Z. (2023). Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(1). <https://doi.org/10.18592/jiu.v22i1.9416>
- Fox, J. (2013). Religious Discrimination against Religious Minorities in Middle Eastern Muslim States. *Civil Wars*, 15(4). <https://doi.org/10.1080/13698249.2013.853413>
- Gazi. (2013). Psikologi Sosial Mayoritas-Minoritas: Menguji Pengaruh Identitas Sosial, Orientasi Dominasi Sosial, Persepsi Keterancaman Terhadap Dukungan Atas Kekerasan. *Laporan Penelitian Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN Syarifhidayatullah Jakarta*.
- Goffman, E. (1963). Behavior in public place. *Glencoe: The Free Press*.
- Hanafi, I. (2018). AGAMA DALAM BAYANG-BAYANG FANATISME; Sebuah upaya Mengelola Konflik Agama. *Toleransi*, 10(1).
- Hanif, M., & Dwi, D. (2021). THE ROLE OF ISLAMIC GOVERNMENT IN BUMI MELAYU. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(2). <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v4i2.107>
- Hasbullah. (2007). *Islam dan Transformasi Kebudayaan Melayu di Kerajaan Siak*. Yayasan Pusaka Riau.
- Jubba, H., Rafi, M., & Qodir, Z. (2021). Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/politicon.v3i1.11481>
- Junaidi, J. (2020). Islam dalam Jagad Pikir Melayu. *Buletin Al-Turas*, 20(2). <https://doi.org/10.15408/bat.v20i2.3744>
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. LKiS.
- Mahdini. (2003). *Islam dan Kebudayaan Melayu*. Daulat Riau.
- Majelis Rohani Nasional. (2013). *Agama Baha'i*. Majelis Rohani Nasional.
- Mohammad, M. (2009). *Dilema Melayu*. Marshal Cavendish.
- Muhammad Hafiz, & Tafsiruddin. (2022). MASYARAKAT MELAYU RIAU BERBUDAYA. *Dakwatul Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v6i2.505>

- Mullaney, M. M. (1993). Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts . James C. Scott . *The Journal of Modern History*, 65(3). <https://doi.org/10.1086/244678>
- Nuh, N. M. (2014). *Eksistensi Agama Baha'i, Tao dan Sikh di Indonesia*.
- Nurhanisah Senin, Mustafa Kamal Amat Misra, & Nazneen Ismail. (2021). Monoteisme Dalam Wacana Agama: Analisis Menurut Perspektif Islam Monotheism in Religious Discourse: Analysis in Islamic Perspective. *Jurnal Pengajian Islam*, 14(1).
- Merdeka.com, *Penganut agama Baha'i di Siak kesulitan bikin KK dan KTP*. (2016, January 28). <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Penganut-Agama-Bahai-Di-Siak-Kesulitan-Bikin-Kk-Dan-Ktp.Html>.
- Porath, N. (2013). "Not to Be Aware Anymore": Indigenous Sumatran Ideas and Shamanic Experiences of Changed States of Awareness/Consciousness. *Anthropology of Consciousness*, 24(1). <https://doi.org/10.1111/anoc.12001>
- Porath, N. (2015). Maya (image) in indigenous Riau world-view: A forgotten concept of Malayan animist thought and ritual practice. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 88. <https://doi.org/10.1353/ras.2015.0022>
- Porath, N. (2018). The orang batin/orang sakai in the malay kingdomof siak sri indrapura. *Asian Ethnology*, 77(1–2).
- Puji Hartatik, & Listyaningsih. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Kelompok Penganut Agama Baha'i di Desa Cebilek Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7(2).
- Purnama, H. (2021). Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101>
- Rab, T. (1990). *Fenomena Melayu*. Lembaga Studi Sosial Budaya Riau.
- Ridwan. (2005). *Belajar Mudah Penelitian*,. Alfabeta.
- Rizaldy, Y., & Suyanto, T. (2020). Strategi Penganut Agama Baha'i Di Kota Surabaya Dalam Mempertahankan Eksistensinya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(2).
- Rohmatullah, M. K., & Khanayya, S. (2023). Komunitas Agama Baha'i Dalam Kontestasi Dan Akomodasi. *Jurnal Multidisipliner Bharasa*, 2(01). <https://doi.org/10.56691/jurnalmultidisiplinerbharasa.v2i01.277>
- Rosyid, M. (2019). RESOLUSI KONFLIK UMAT AGAMA BAHAI DENGAN MUSLIM: STUDI KASUS DI PATI JAWA TENGAH. *Harmoni*, 18(1). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i1.345>
- Schneider, L., & Goffman, E. (1964). Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings. *American Sociological Review*, 29(3). <https://doi.org/10.2307/2091496>
- Scott, J. C. (2022). Chapter Eight: A Saturnalia of Power: The First Public Declaration of the Hidden Transcript. In *Domination and the Arts of Resistance*. <https://doi.org/10.12987/9780300153569-010>

- Senin, N., & Hambali, K. M. (2018). Pandangan Islam Terhadap Konsep Kesatuan Agama dalam Bahai. *International Journal of Humanities, Philosophy, Language*, 1(4).
- Sinaga, A. A., & Sihombing, L. H. (2022). Penganut Agama Baha' I dan Posisinya sebagai Kelompok Minoritas di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6). <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1410>
- Tarwiyani, T. (2021). Sejarah Kebudayaan Melayu. *Historia : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2). <https://doi.org/10.33373/hstr.v6i2.3085>
- Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient Individuals Use Positive Emotions. *Journal Pers Social Psychology*, 86(2).
- Veronika, N., Elfemi, N., & Yuhelna. (2021). Fenomena Masyarakat Mentawai Masih Mempertahankan Agama Baha'i (Studi Kasus Desa Mongan Poula Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai). *Horizon*, 1(2). <https://doi.org/10.22202/horizon.2021.v1i2.4802>
- Ward, B. E., & Barth, F. (1967). Models of Social Organization. *Man*, 2(2). <https://doi.org/10.2307/2799520>
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2).
- Zikri, A. (2020). Indonesia Zamrud Keragaman Upaya Penegelolaan Keragaman. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 12(1). <https://doi.org/10.24014/trs.v12i1.10630>